

PENGANGGURAN DI KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KEBIJAKAN MENGATASINYA

Nurlina T, Kiagus M. Sobri, dan Yunisvita
Fakultas Ekonomi dan FISIP Universitas Sriwijaya

Abstrak

Masalah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran merupakan masalah yang banyak terjadi di Negara Sedang Berkembang, termasuk di Indonesia. Faktor penyebab kedua pengangguran ini selalu diarahkan pada tingginya tingkat urbanisasi desa-kota. Padahal hulu dari pengangguran adalah jumlah kelahiran (TFR) di desa relatif tinggi. Penelitian ini untuk melihat sejauhmana kedua faktor (urbanisasi dan TFR) mempengaruhi pengangguran di kota-kota (Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuk Linggau) di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Penentuan responden dengan metode *purposive random sampling* berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja pada masing-masing kota. Hasil penelitian menemukan beberapa hal: *pertama*, rata-rata jumlah keluarga yang relatif banyak yang memperlihatkan tingkat kelahiran yang yang tinggi sementara upah yang diterima di desa relatif kecil menjadi penyebab mereka berurbanisasi ke kota. *Kedua*, lebih dari 50% migran ke Prabumulih dan Pagaralam tidak langsung memperoleh pekerjaan dan ini menciptakan pengangguran terbuka. *Ketiga*, fenomena setengah pengangguran terjadi di kota-kota di provinsi Sumatera Selatan, pekerja migran memiliki jam kerja rata-rata 49,98 jam/minggu (di atas 40 jam/minggu) sedangkan pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Berdasarkan penelitian ini maka kebijakan yang sebaiknya adalah merubah perilaku seseorang dengan melakukan sosialisasi terus menerus tentang jumlah anak, tingkat pendidikan, pekerjaan yang mengedepankan jiwa *entrepreneur* (kewirausahaan) yang akan mempengaruhi tingkat kehidupan yang layak.

Kata kunci: Urbanisasi, *Total Fertility Rate*, Setengah Pengangguran,

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat rumit di dalam pembangunan ekonomi, sehingga memerlukan penanganan khusus. Keadaan yang tidak seimbang antara kemampuan negara berkembang untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah dari waktu ke waktu menimbulkan implikasi semakin tingginya angka pengangguran. Faktor penyebab pengangguran di kota selalu diarahkan sebagai akibat urbanisasi desa-kota yang didorong oleh kurangnya lapangan kerja di desa. Pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi. Fenomena ini disebut sebagai “urbanisasi berlebih atau *over urbanization*”, yang menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat.

Urbanisasi, apalagi dalam skala besar akan menyebabkan penambahan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja di kota semakin tinggi. Para urban akan memperebutkan sejumlah lapangan kerja. Apabila tidak dapat terserap akan memunculkan pengangguran terbuka dan bila terserap tetapi dengan upah relatif kecil akan memunculkan setengah pengangguran. Kelompok yang termasuk setengah menganggur dapat diklasifikasi menjadi setengah menganggur yang kentara (*visible unemployment*) dan setengah menganggur tak kentara (*disguised unemployment*) (Bakir dan Chris Manning, 1983).

Akan tetapi, mereka yang berurbanisasi selain disebabkan lapangan kerja di desa yang semakin sempit, juga disebabkan jumlah anggota inti yang relatif banyak. Dalam artian TFR (*total fertility rate*) di desa relatif tinggi. Berkaitan dengan ini, White et.al (2006) dan Shapiro and Tambashe (2002) menyatakan bahwa terdapat asosiasi yang cukup kuat antara urbanisasi dan fertilitas. Urbanisasi meningkat karena fertilitas meningkat dan bila tidak tertampung dalam pekerjaan akan memunculkan pengangguran.

TFR yang tinggi di desa, sementara lapangan kerja di desa semakin berkurang menyebabkan penduduk berurbanisasi ke kota. Besarnya jumlah penduduk yang pindah ke kota ditambah dengan penduduk urban yang sudah ada akan menjadi persoalan, artinya jumlah angkatan kerja yang bersaing di pasar kerja di kota semakin banyak. Mereka yang tidak dapat bersaing akan memunculkan pengangguran terbuka sedangkan yang dapat bersaing masih memunculkan masalah setengah pengangguran, apabila mereka telah bekerja penuh (*full-employed*) tetapi pendapatan yang diperoleh masih dalam kategori KHL (kebutuhan hidup layak). Tentu saja hal ini akan memicu munculnya permasalahan baru yaitu kemiskinan.

Di beberapa kota di Indonesia, angka pengangguran terbuka relatif tinggi, misalnya di kota Bandung pada tahun 2011 mencapai 13%, Surabaya 7% pada tahun 2010, dan di Palembang pada tahun 2011 mencapai 11% (dari 1,5 juta penduduk). Angka pengangguran di Palembang ini jauh lebih tinggi dari angka pengangguran Sumatera Selatan, yakni 5,70% pada tahun 2012.

Angka pengangguran terbuka ditambah dengan setengah pengangguran tersebut memunculkan masalah inefisiensi dalam pembangunan. Oleh karenanya penelitian ini ditujukan untuk merumuskan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran di kota.

2. Rumusan Masalah

- a) Sejauhmana urbanisasi dan TFR sebagai faktor penentu pengangguran di kota-kota di Sumatera Selatan.
- b) Apakah kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk pengurangan pengangguran di kota-kota di Sumatera Selatan.

3. Tujuan Penelitian

- a) Ingin mengetahui, menelaah dan menganalisis akar masalah pengurangan pengangguran.
- b) Menganalisis implikasi kebijakan pengurangan pengangguran di kota-kota di Sumatera Selatan.

STUDI PUSTAKA

Ehrenberg (2003) dan Kaufmann (2003) menyatakan jenis pengangguran menurut teori Klasik terdiri dari pengangguran struktural, friksional dan *seasonal* sedangkan menurut Keynesian adalah pengangguran siklikal. Keempat jenis pengangguran ini akan memunculkan pengangguran terbuka (sedang mencari kerja) dan setengah pengangguran.

Setengah pengangguran, menurut Philip Hauser (1974) dan Clifford Clogg (1979), terdiri dari kategori berikut: (a) *working poor* yaitu orang-orang yang bekerja *full time*, sepanjang tahun, tapi mempunyai penghasilan 125% dibawah garis kemiskinan, (b) pekerja paruh waktu termasuk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu karena tidak mendapatkan pekerjaan *full time*, (c) pengangguran adalah orang yang saat ini tidak bekerja dan aktif mencari kerja, dan (d) *discouraged worker (sub-unemployment)* adalah orang yang ingin bekerja namun belum mencari kerja karena mereka merasa tidak akan memperoleh pekerjaan dengan berbagai alasan.

Lebih lanjut, kedua ahli di atas menyatakan bahwa setengah pengangguran adalah ukuran empiris *employment marginal* yang tidak sempurna. Ada 2 (dua) hal yang mendorong perhatian terhadap setengah pengangguran yaitu: pertama, pergeseran (*shift*) sistem kesejahteraan sosial, dan kedua, struktur kesempatan kerja yang telah berubah yang merugikan pekerja yang tidak terampil.

Apapun jenis pengangguran, tetap saja mendatangkan masalah. Lazimnya, jalan keluar pengangguran di desa adalah melakukan urbanisasi (pindah ke kota). Besarnya jumlah angkatan kerja yang telah ada di kota dan ditambah dengan mereka yang masuk ke kota akan menimbulkan permasalahan persaingan di bursa pasar kerja. Persaingan semakin ketat, bila pengguna tenaga kerja menetapkan kualifikasi tertentu yang berkaitan dengan karakteristik pekerja, seperti umur, tingkat pendidikan yang ditamatkan, status sosial ekonomi dan aspirasi terhadap mobilitas sosial. Bagi yang tidak dapat memenuhi standar kualitas minimum yang ditetapkan akan lari ke sektor informal dengan membuka usaha sendiri, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Akibatnya

terjadi penumpukan pengangguran di kota yang memang telah ada dan akan menambah jumlah pengangguran di kota.

Dengan demikian, urbanisasi selalu di anggap sebagai akar masalah pengangguran. Faktor ini memang tidak dapat dipungkiri, tetapi bukan penyebab utama. Akar masalah sesungguhnya adalah banyaknya jumlah angkatan kerja di desa yang disebabkan angka kelahiran di desa masih relatif tinggi. [Chin J Popul Sci](#). (1994: 6, 2: 201-10) menyatakan fertilitas di desa jauh lebih tinggi dibanding di kota. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kwon et.al (dalam Yoo Myung-Kee, 2005) bahwa tingkat fertilitas di kota-kota di Negara Korea lebih rendah dari di desa. Kondisi yang sama terjadi di Sumatera Selatan, tingkat fertilitas di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan (Grand Desain Sumatera Selatan, 2013).

Lebih lanjut, mereka yang berurbanisasi diharapkan akan mengadaptasi norma baru yakni “menyetujui” penurunan fertilitas. Sehingga terjadi perubahan ideasional, seperti sikap dan kepercayaan atas pentingnya keluarga besar akan bergeser ke keluarga kecil. Tetapi norma baru tersebut tidak cepat diyakini dan diimplementasi oleh para urban baru. Ada jangka waktu untuk dapat memahami norma baru tersebut. Jangka waktu tersebut dapat singkat dan dapat juga dalam waktu yang lama. Karena itu, peneliti lain seperti Hollos and Larsen, (dalam White, et.al: 2006) menyatakan tidak ada hubungan antara fertilitas dan migrasi desa-kota. Hal ini disebabkan keterbatasan dan lambatnya informasi saat melakukan mobilitas. Pendapat Hollos and Larsen berbeda dengan yang diungkapkan oleh White et.al (2006) dan Shapiro and Tamashe (2002).

Bagi daerah, urbanisasi dapat memberikan dampak positif dan atau dampak negatif. Adanya dampak positif tersebut maka aliran urbanisasi dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi lewat aglomerasi ekonomi (Lewis, Blame D, 2010). Aglomerasi ekonomi merujuk pada kenaikan produktivitas. Ini disebabkan terjadinya pendistribusian SDM (sumber daya manusia) dari daerah dengan produktivitas rendah ke daerah dengan produktivitas tinggi (Nurlina, 2013). Dampak negatif urbanisasi adalah terjadinya gap ketidaksejahteraan antar daerah. Daerah yang ditinggalkan semakin kehilangan sumber daya manusia

sebagai input dalam proses produksi, sedangkan daerah tujuan mengalami *booming* tenaga kerja yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan.

Akibatnya terjadi inefisiensi ekonomi dan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah asal (Hugo, et.al, 1987; Nurlina, 2013). Efek negatif semakin besar, jika infrastruktur ekonomi tidak tersedia dan kompetensi pencari kerja tidak dapat memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pengusaha.

Untuk memahami hubungan antara *rural-urban migration* (urbanisasi) dan fertilitas, ada 4 teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu: teori selektivitas, teori *disruption* (gangguan), teori adaptasi, dan teori sosialisasi (White et al, 2002). Teori Selektivitas menyatakan keputusan bermigrasi terkait dengan karakteristik migran (umur, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, aspirasi terhadap mobilitas sosial) dan ini akan berpengaruh terhadap fertilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apakah fertilitas turun atau naik akan ditentukan oleh pengalaman dan urgensi dari migrasi itu sendiri, atau karena ada penyesuaian terhadap pola kehidupan urban. Fertilitas dan perilaku migrasi merupakan dua hal yang satu sama lain menentukan pola fertilitas yang unik diantara migran. Teori Disruption atau teori pengganggu menyatakan bahwa ada perubahan perilaku dari budaya tradisional ke budaya urban yang akan mempengaruhi fertilitas. Seperti: mengurangi intercourse (hubungan kelamin), mempersingkat masa menyusui, dan sterilisasi. Teori Adaptasi menyatakan bahwa adaptasi pada tingkat individu dipengaruhi oleh perbedaan umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan adaptasi pada *place-level* dipengaruhi oleh *opportunity structure*, pelayanan keluarga berencana, dan norma-norma sosial. Terakhir, teori Sosialization. Teori ini menyatakan bahwa perubahan perilaku fertilitas terjadi pada generasi kedua dari para migran bukan pada generasi pertama. Dari perspektif ini diyakini bahwa fertilitas migran generasi kedua mirip dengan penduduk urban daripada migran generasi pertama, yakni memiliki perilaku fertilitas rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kuantitatif*. Wilayah penelitian adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan unit-unit analisis pada kota-kota yang diduga banyak terjadi urbanisasi. Kota yang dipilih adalah kota secara administratif memang ditetapkan sebagai kota, yakni Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuk Linggau. Sumber data diperoleh dari data primer dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden serta dengan *key informan* (Camat, Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT/RW) melalui *focus group discussion*. Jumlah responden ditentukan dengan metode *purposive random sampling* berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja pada masing-masing kota (Tabel 1).

Sedangkan data sekunder berupa literatur tentang model kebijakan pengurangan pengangguran di kota-kota di negara berkembang dan negara maju.

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara peringkasan atau reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), triangulasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Tabel 1. Distribusi Responden Tiap Kota

No	Kota	Jumlah Tenaga Kerja	Proporsi	Jumlah Responden
1.	Palembang	579.473	72.5	290
2.	Prabumulih	69.746	8.7	35
3.	Pagaralam	63.139	7.9	32
4.	Lubuk Linggau	86.754	10.9	43
	Total	799.112	100.0	400

Sumber: Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, BPS, 2012, diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Selatan merupakan wilayah penerima para migran dalam bentuk transmigrasi sejak tahun 1909. Daerah penerima transmigrasi adalah Gedong Tataan (sekarang masuk dalam propinsi Lampung), Tugumulyo (wilayah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumsel), dan Belitang (Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumsel). Proses kedatangan para migran ke Sumatera Selatan terus

berlanjut, baik dalam bentuk migrasi 'jebol desa', migrasi 'swakarsa' dan migrasi atas biaya sendiri. Jika di masa lalu, para migran ke Sumatera Selatan adalah untuk membuka lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka pada masa kini mereka datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena itu, tujuan migran bukan lagi ke desa tetapi ke kota-kota besar. Perpindahan migran ke empat kota ini karena kota-kota ini berkembang cukup pesat. Palembang sebagai ibukota provinsi merupakan daya tarik bagi para migran. Sedangkan Lubuk Linggau merupakan kota transit baik dari Selatan (Muara Enim, Lahat), Timur (dari Bengkulu) maupun ke Utara (ke Jambi, Riau dan Sumatera Barat).

1. Deskripsi Responden

Perpindahan responden ke Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuk Linggau terjadi dari periode 1980-1989 sampai periode 2010-2014, dan terbanyak terjadi pada periode 1980-1989. Umur saat pindahpun bervariasi antara kurang dari 15 tahun sampai umur 45-59 tahun. Mereka yang pindah terbanyak pada kelompok umur produktif, yakni umur 15-29 tahun dan 30-44 tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Perpindahan Responden Pertama Kali ke 4 Kota Besar di SUMSEL dan Umur Saat Pindah

No.	Tahun pindah pertama kali		No	Umur saat pindah	
	Tahun	Persen		Umur	Persen
1	1980-1989	27,3	1	< 15	19,8
2	1990-1999	24,3	2	15-29	46,8
3	2000-2009	22,0	3	30-44	18,0
4	2010-2014	17,0	4	45-59	2,3
			5	Tidak menjawab	13,3
	Jumlah	100,0			100,0

Sumber: data lapangan

Jika dikaitkan dengan status pernikahan, mereka yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga melakukan perpindahan di bawah umur 15 tahun relatif cukup banyak. Sekitar 22% yang sudah berkeluarga pindah ke daerah tujuan kota Prabumulih. Sementara yang belum berkeluarga pindah ke Palembang 16,78%, Prabumulih 30,77% dan Lubuk Linggau sebanyak 27,27% (Tabel 3).

Alasan mereka pindah beragam, yang terbanyak adalah alasan mencari pekerjaan, sementara alasan untuk memperoleh upah lebih tinggi menempati urutan terkecil (Lampiran 1).

Tabel 3. Persentase Responden berdasarkan Status dan Umur Saat Pindah di Masing-masing Kota

Kota	Kota				
	PLG	Prabumulih	Pagaralam	L.Linggau	4 kota di Sumsel
Sudah berkeluarga					
< 15 tahun	0	22,22	0	0	1,13
15-29 tahun	37,58	66,67	66,67	61,91	42,94
30-34 tahun	44,68	11,11	33,33	38,09	41,81
45-49 tahun	3,55	0	0	0	2,82
Tidak menjawab	14,18	0	0	0	11,29
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Belum berkeluarga					
< 15 tahun	16,78	30,77	0	27,27	17,49
15-29 tahun	57,72	50,00	0	72,73	59,19
30-34 tahun	2,01	11,53	65,38	0	6,73
45-49 tahun	1,34	7,79	34,62	0	1,79
Tidak menjawab	22,15	0	0	0	14,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: data lapangan

Kepindahan ke kota tujuan ternyata memunculkan problem ketika sebagian dari mereka tidak langsung memperoleh pekerjaan; lebih dari 50% migran menjadi penganggur (terjadi di kota Prabumulih dan Pagaralam). Fenomena menjadi pengangguran ternyata tidak dialami oleh responden dengan tujuan ke kota Palembang dan Lubuk Linggau (lebih dari 60%) (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Responden yang Langsung dan Tidak Langsung Memperoleh Pekerjaan Saat pindah

Kota	Langsung/tidak Langsung Memperoleh Pekerjaan			Jumlah
	Ya	Tidak Berpendapat		
		Tidak	Tidak Berpendapat	
Palembang	63,2	31,2	5,6	100,0
Prabumulih	16,7	62,5	20,8	100,0
Pagaralam	27,3	72,7	0	100,0
Lubuk Linggau	63,3	36,7	39,50	100,0
4 Kota di SUMSEL	54,5	39,5	5,9	100,0

Sumber: data lapangan

Faktor penyebab mereka tidak langsung memperoleh pekerjaan sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan dimana sebagian dari mereka (39,8%) berpendidikan SD (Tabel 5). Implikasi dari tingkat pendidikan rendah terlihat dari sebagian besar responden yang terserap di sektor-sektor informal (Tabel 6) sebagai tukang ojek dan penjual makanan, sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh adalah sebagai buruh kasar, buruh panggul, tukang beca dan lain-lain. Sedangkan mereka yang terserap di sektor 'lainnya' tersebar sebagai PNS, wirausaha, ABRI, dan kontraktor.

Tabel 5. Pendidikan yang Ditamatkan Responden (%)

Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1,D3, UN	
Palembang	28,8	12,0	20,3	11,5	72,5
Prabumulih	3,0	4,0	1,8	0	8,8
Pagaralam	4,5	1,8	0,8	1,0	8,0
Lubuk Linggau	3,5	3,0	4,3	0	10,8
4 Kota di Sumsel	39,8	20,8	27,0	12,5	100,0

Sumber: data lapangan

Tabel 6. Pekerjaan Utama Responden (%)

Kota	Buruh	Tukang Ojek	Penjual Makanan	Lainnya*)	Jumlah
Prabumulih	88,6	2,9	5,7	2,9	100,0
Pagaralam	59,4	3,1	12,5	25,0	100,0
Lubuk Linggau	14,0	11,6	30,2	44,2	100,0
4 Kota Sumsel	41,0	10,8	28,3	20,0	100,0
(n)	164	43	113	80	400

Sumber: data lapangan

Adapun faktor yang mendorong (*push factor*) responden melakukan perpindahan adalah disebabkan pekerjaan di tempat asal tidak memuaskan dan upah relatif kecil. Sedangkan faktor penarik (*pull factor*) adalah berupa tawaran upah lebih tinggi di tempat tujuan, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7.

Selain itu, jumlah anak yang dipunyai juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan perpindahan dengan tujuan agar anak memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ternyata hanya 17,9% responden

di Palembang, 20,9% responden di Lubuk Linggau (dan di dua kota lainnya lebih kecil) yang berpikir bahwa kepindahan mereka untuk masa depan anak baik yang berkaitan pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini dapat difahami, mengingat sebagian besar mereka berpendidikan dan berpendapatan rendah, dan bekerja sebagai buruh kasar.

Tabel 7. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Responden Melakukan Perpindahan Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Faktor	Pendidikan (%)				Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1/D3/UN	
Pendorong					
• Pekerjaan tidak Memuaskan	18,8	8,0	10,3	1,0	38,0
• Upah relatif kecil	6,5	5,0	4,8	3,3	19,5
Penarik					
• Tawaran upah yang tinggi	7,5	4,0	5,0	4,3	20,8
Faktor lain	5,5	2,8	5,3	2,8	16,3
Tidak pindah	1,5	1,0	1,8	1,2	5,5
	39,8	20,8	27,0	12,5	100,0

Sumber: data lapangan

Tabel 8. Anak merupakan Faktor Pendorong Melakukan Perpindahan (%)

Kota	Pendidikan Anak Masa Depan	Pekerjaan Anak Masa Depan	Lainnya	Tidak punya pendapat	Jumlah
Palembang	14,5	3,4	3,8	78,3	100,0
Prabumulih	5,7	0	5,7	88,6	100,0
Pagaralam	3,1	3,1	0	93,8	100,0
Lubuk Linggau	18,6	2,3	2,3	78,7	100,0
SUMSEL	13,3	3,0	3,5	80,3	100,0

Sumber: data lapangan

Pada bagian awal telah dinyatakan bahwa akar masalah pengangguran yang terjadi di kota-kota selain disebabkan tingginya urbanisasi (dari desa ke kota) juga karena TFR di desa tinggi. Rata-rata anak yang dimiliki keluarga lebih dari 2. Ada berbagai alasan yang dinyatakan oleh responden kenapa mereka menambah jumlah anak walaupun sudah memiliki 2 anak saat mereka pindah ke kota. Alasan pertama, terlanjur (11,5%), kedua keinginan pribadi (17,5%), ketiga

harapan masa depan/masa tua (5%) sedangkan sisanya tidak mempunyai alasan yang jelas yaitu 66,1%.

Tabel 9. Persentase Responden yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Saran Pemerintah KB

Kota	Mengikuti Saran Pemerintah*)			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak Berpendapat	
Palembang	33,8	36,2	30,0	100,0
Prabumulih	37,1	40,0	22,9	100,0
Pagaralam	50,0	28,1	21,9	100,0
Lubuk Linggau	39,5	37,2	23,3	100,0
4 Kota di SUMSEL	36,0	36,0	28,0	100,0

Sumber: data lapangan

Selanjutnya, ketika dipertanyakan apakah mereka akan mengikuti saran pemerintah bahwa 2 anak lebih baik, maka jawaban antara mengikuti dan tidak mengikuti relatif sama besar (Tabel 9). Nampaknya hal ini makin menunjukkan adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB itu sendiri. Bila dilihat dari jenis pekerjaan, kelompok buruh merupakan sebagian besar yang tidak mengikuti saran pemerintah (Lampiran 2).

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa akar masalah pengangguran di kota-kota besar, selain karena kurangnya lapangan kerja di desa adalah tingkat fertilitas yang tinggi di desa. Setelah mereka pindah ke kota, pandangan migran tentang jumlah anak ideal telah mengalami perubahan bila dikaitkan dengan jumlah anak yang telah mereka miliki. Secara umum mereka memahami bahwa jumlah anak ideal adalah antara 1 sampai 2 anak (36,9% responden di Palembang, 25,7% di Prabumulih, 68,8% di Pagaralam dan 16,3% di Lubuk Linggau). Meskipun memahami, sebagian dari mereka merasa tidak cukup dengan anak yang dimiliki. Bahkan diantaranya, 22,9 di Prabumulih dan 28,1% di Pagaralam menyatakan pendapat bahwa anak ideal yang dimiliki keluarga sekurang-kurangnya 3 anak bahkan lebih (Lampiran 3).

Pendapat ini didukung dengan pernyataan perlu mengganti anak jika ada anak yang dilahirkan meninggal. Memang jumlah kematian anak dikalangan migran relatif kecil. Dari jumlah anak yang dilahirkan, sekitar 90,2% dapat

terus hidup dan 9,7% meninggal, dan ada 7,2% yang berniat menggantikan anak yang meninggal (Tabel 10).

Tabel 10. Persentase Anak yang Dilahirkan Meninggal dan Niat Mengganti Anak yang Meninggal

Anak dilahirkan	%	Niat Mengganti Anak yang Meninggal	%
Tidak ada meninggal	90,2	Tidak Mengganti	85,5
1-2 anak	7,3	Ya	7,2
3-5 anak	2,4	Tidak	7,3
Jumlah	100,0		100,0

Sumber: data lapangan

Memperhatikan rata-rata jam kerja dan rata-rata pendapatan responden di tempat asal dan di tempat tujuan menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja di tempat tujuan lebih dari 40 jam per minggu sedangkan di tempat asal rata-rata 24 jam per minggu (Tabel 11). Dalam konsep pengangguran terbuka, bila bekerja 40 jam per minggu atau lebih maka bermakna tidak termasuk sebagai pengangguran terbuka.

Tabel 11. Rata-Rata Jam Kerja Responden perminggu di Tempat Asal dan Tempat Sekarang

Kota	Rata-rata jam kerja perminggu	
	Tempat Asal	Tempat Sekarang
Palembang	22,36	48,72
Prabumulih	14,31	53,46
Pagaralam	32,80	47,64
Lubuk Linggau	42,0	57,06
4 Kota Sumsel	23,6	49,98

Sumber: data lapangan

Namun jika diamati lebih jauh, meskipun mereka bekerja dengan jam kerja penuh, pendapatan yang diperoleh relatif kecil (Tabel 12) bila dibandingkan dengan KHL (kebutuhan hidup layak). Berdasarkan KHL di Palembang Rp 1.884.533 (KHL untuk lajang), dan dengan asumsi KHL di kota lainnya sama dengan KHL di Palembang serta berdasarkan pendapatan rata-rata per anggota rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden di semua kota belum dapat memenuhi standar KHL.

Tabel 12. Rata-Rata Pendapatan di Tempat Asal dan Tempat Sekarang, dan Pendapatan Per ART

Kota	Rata-rata Pendapatan perbulan		Pendapatan per ART	Rata-rata jumlah ART
	Tempat Asal	Tempat Sekarang		
Palembang	809.724	2.185.575	728.525	3
Prabumulih	485.714	1.694.000	564.666	3
Pagaralam	375.000	1.023.437	255.859	4
Lubuk Linggau	664.767	2.374.930	791.643	3
4 Kota Sumsel	731.012	2.059.517	686.505	3

Sumber: data lapangan

2. Deskripsi Tetangga Responden

Baik para migran maupun tetangga mereka, rata-rata memiliki jumlah anak yang banyak. Sebagian besar para tetangga di masing-masing kota memiliki jumlah anak rata-rata 3-5 orang, dan secara keseluruhan mencapai 54,6%. Perpindahan penduduk dengan jumlah anggota keluarga yang banyak dan bergabung dengan tetangga yang juga memiliki anak yang banyak, tentu akan menimbulkan permasalahan baru di setiap kota yang menjadi objek penelitian ini.

Selain para migran yang melakukan perpindahan, tetangga para migran juga melakukan perpindahan. Menurut para migran bahwa mereka sebagian besar pindah ke Jakarta wilayah Sumatera Selatan, wilayah pulau Sumatera dan luar pulau Sumatera antara lain ke Bangka, Kalimantan dan propinsi- propinsi di pulau Jawa dan Bali.

3. Hasil FGD (Focus Group Discussion)

FGD dilakukan dengan Ketua RT sebagai wakil pemerintah dan dengan masyarakat yang menjadi responden. Beberapa item ditanyakan kepada Ketua RT dan masyarakat meliputi:

- a) Persentase jumlah penduduk asli dan pendatang dilingkungan tempat tinggal.
- b) Keharmonisan atau ketidakharmonisan antara penduduk asli dan pendatang dalam kegiatan keseharian dan juga kegiatan sosial.

- c) Faktor pendorong dan penarik yang utama dari para responden untuk pindah.
- d) Dengan banyaknya jumlah penduduk, kegiatan apa yang dilakukan untuk menunjang program keluarga sejahtera (KB, 2 anak lebih baik).

Hasil diskusi dapat dibedakan dalam 2 hal: kesejahteraan dan TFR. Dari sisi kesejahteraan, mereka merasa lebih sejahtera di tempat sekarang (Palembang dan Lubuk Linggau) dibandingkan ketika berada di tempat asal, dengan indikator pendapatan di tempat sekarang sekarang lebih besar dibandingkan pendapatan di tempat asal. Dalam kaitan ini mereka hanya melihat besaran nominal dan tidak memahami konsep pendapatan riil. Dalam konteks kesejahteraan, menurut mereka pemerintah telah berbuat banyak. Namun, kebijakan pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama dana pendidikan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini berarti, mereka sangat memahami bahwa kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat jika pendidikan lebih tinggi.

Kebijakan pemerintah lainnya adalah mempermudah atau memperbanyak kucuran dana untuk usaha-usaha mandiri. Selain itu, pelatihan-pelatihan kerja dapat diagendakan dan diberikan secara periodik bagi yang masih menganggur dan miskin sehingga mereka dapat segera memberdayakan dirinya sendiri (*self empowerment*) dan di masa yang akan datang dapat menolong para urban yang baru masuk ke kota tujuan. Saat ini bantuan kredit telah diberikan oleh bank syariah sebanyak Rp 2.000.000,- per 10 orang.

Dari sisi TFR, sebagian mereka menyatakan bahwa pernyataan banyak anak banyak rezeki tidak lagi bisa diterapkan pada masa kini. Namun dari sebagian mereka masih memiliki anak lebih daripada dua anak. Merujuk pada teori Sosialisasi, perubahan perilaku fertilitas untuk hanya mempunyai anak dua tidak bisa terjadi pada generasi migrant pertama, diharapkan dapat terjadi pada generasi kedua mereka. Untuk itu, sosialisasi penurunan TFR perlu terus dilakukan.

4. Tipologi Pengangguran di Empat Kota di Sumatera Selatan

Migrasi ke kota dipandang memperbesar jumlah pengangguran, ketika mereka yang bermigrasi tidak segera memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan 39,5% responden tidak langsung memperoleh pekerjaan, dan ini memunculkan pengangguran terbuka. Kondisi ini terjadi di semua kota dan paling banyak terjadi di Prabumulih dan Pagaram.

Dari sisi jam rata-rata jam kerja, responden di tempat sekarang telah dapat memenuhi kriteria bekerja penuh (*fully utilized*) yaitu 49,98 jam perminggu yang jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat asal yang hanya 23,6 jam perminggu berarti, rata-rata jam kerja di tempat asal menunjukkan adanya *under-utilized* atau kurang dimanfaatkan. Meskipun dari sisi rata-rata jam kerja, mereka telah *fully utilized* tetapi dari sisi pendapatan mereka tergolong dalam *under-utilized* dimana rata-rata pendapatan yang diperoleh semua responden di semua kota belum dapat memenuhi standar KHL.

Seperti dikemukakan di atas, mereka yang bermigrasi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan lapangan pekerjaan tetapi karena faktor tingkat fertilitas yang tinggi di desa. Penelitian ini memperlihatkan masih relatif banyak para migran memiliki anak lebih dari dua sebelum mereka pindah. Bahkan tetangga mereka di tempat asal yang memiliki 3 sampai 5 anak mencapai 54,6% dan 7,3% memiliki lebih dari 5 anak. Lebih lanjut, meskipun sebagian dari mereka mengetahui bahwa Pemerintah menyatakan 2 anak lebih baik dan merupakan jumlah anak yang ideal, akan tetapi 36% dari responden tidak mengikuti saran pemerintah tersebut dan 28% tidak memberikan pendapat. Ketidakmauan mengikuti saran pemerintah terlihat dari pernyataan responden untuk mengganti anak jika ada yang meninggal meskipun jumlahnya relatif kecil. Hanya tidak dilakukan secara spesifik bahwa apakah mereka lebih memilih anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dalam berbagai penelitian terdahulu ditemukan bahwa pilihan orang tua terhadap jenis kelamin anak (khususnya laki-laki) merupakan determinan kuat terhadap perilaku fertilitas (Rai et al., 2014).

Kebijakan pengurangan pengangguran melalui pendekatan ekonomi, berupa penyiapan lapangan kerja dan infrastruktur, salah satunya dengan meluncurkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Sangat disayangkan, sebagian besar responden tidak mengetahui dan bahkan 68,3% tidak terlibat dalam program dimaksud (Tabel 13). Tingkat ketidaktahuan responden yang paling tinggi terjadi di kota Prabumulih (77,1%) dan Lubuk Linggau (60,5 %).

Tabel 13. Persentase Responden Terlibat dan Tidak Terlibat Dalam PNPM Di Empat Kota di Sumsel

Kota	Terlibat			Tidak Terlibat	Jumlah
	Ikut dalam proyek	Mendapat Pinjaman	Lainnya		
Palembang	8,0	11,3	2,8	50,5	72,5
Prabumulih	0,5	0,8	0,8	6,8	8,8
Pagaralam	0,3	0,5	5,8	1,5	8,0
Lubuk Linggau	1,0	0	0,3	9,5	10,8
4 Kota di Sumsel	9,8	12,5	9,5	68,3	100,0

Sumber: data lapangan

Infrastruktur yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung mobilitas orang dan barang lebih cepat, dan faktor ini merupakan faktor pendukung peningkatan pendapatan. Dari seluruh responden, 78,5 % menyatakan kondisi infrastruktur di tempat sekarang lebih baik daripada di tempat asal (Tabel 14).

Tabel 14. Persentase Responden tentang Kondisi Infrastruktur Di Tempat Sekarang Dibandingkan tempat Asal

Kota	Kondisi Infrastruktur di Tempat Sekarang			Jumlah
	Lebih Baik	Tidak lebih Baik	Tidak Jawab	
Palembang	56,3	9,0	7,3	72,5
Prabumulih	7,5	0,3	1,0	8,8
Pagaralam	7,0	1,0	0	8,0
Lubuk Linggau	7,8	3,0	0	10,8
4 Kota di Sumsel	78,5	13,3	8,3	100,0

Sumber: data lapangan

Permasalahannya meskipun infrastruktur lebih baik, namun tidak mendorong kehidupan respnden menjadi lebih baik (rata-rata pendapatan di

bawah KHL). Bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden yang sebagian besar berpendidikan rendah, maka faktor infrastruktur tidak efektif dan mendorong peningkatan pendapatan.

5. Implikasi Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Kebijakan pengurangan pengangguran dapat difokuskan pada pendekatan ekonomi, sosial dan sosial-ekonomi. Pendekatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, regulasi tentang bantuan modal, kebijakan yang *pro-poor* dan *pro-job*. Pendekatan sosial dengan merubah pola perilaku fertilitas, sedangkan pendekatan sosial ekonomi adalah pendekatan yang memadukan pendekatan ekonomi dan sosial, mengkaitkan antara peningkatan ekonomi dan peningkatan pendidikan.

Berkaitan dengan pendekatan di atas, model kebijakan yang ada mengacu pada teori *selectivity*, *disruption*, *adaptation* dan teori *socialization*. Teori selektivitas menyatakan bahwa keputusan bermigrasi terkait dengan karakteristik umur, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, dan aspirasi terhadap mobilitas sosial. Teori *disruption* atau teori pengganggu menyatakan bahwa harus ada perubahan perilaku dari budaya tradisional ke budaya urban yang akan mempengaruhi fertilitas. Teori adaptasi, perlu ada adaptasi pada tingkat individu dipengaruhi oleh *opportunity structure*, pelayanan keluarga berencana, dan norma-norma sosial. Sedangkan teori sosialisasi menekankan bahwa perubahan perilaku fertilitas terjadi pada generasi kedua dari para migran bukan pada generasi pertama.

Dari berbagai uraian di atas, kebijakan yang dibuat haruslah mengacu pada akar masalah pengangguran itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini maka kebijakan yang sebaiknya adalah merubah perilaku seseorang dengan melakukan sosialisasi terus menerus tentang jumlah anak, tingkat pendidikan, pekerjaan yang mengedepankan jiwa *entrepreneur* (kewirausahaan) yang akan mempengaruhi tingkat kehidupan yang layak.

Secara terinci, ada beberapa kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran di kota yakni:

- 1) Pengendalian TFR di kota dan di desa,
- 2) Peningkatan pendidikan, khususnya untuk anak-anak, agar ada perubahan perilaku fertilitas menuju keluarga kecil,
- 3) Membangun sarana pendidikan di desa sehingga para remaja tidak harus melanjutkan pendidikan di kota, dan juga agar jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan kebutuhan perusahaan dapat seimbang.
- 4) *Self empowerment*, pemberdayaan diri, agar dapat dibangun usaha mandiri/usaha kreatif, untuk itu perlu dikembangkan program latihan kewirausahaan,
- 5) Memberi bantuan pinjaman, dan atau mempermudah akses untuk memperoleh pinjaman, khusus untuk keluarga miskin tanpa agunan.
- 6) Memberi bantuan modal pada usaha-usaha keluarga di sektor informal, sehingga dapat menambah penghasilan mereka,
- 7) Desa lebih dimodernisasi dengan berbagai fasilitas kota, agar lebih betah tinggal di daerah asal.

Di kota, sektor yang menghasilkan *employment* tertinggi adalah jasa sementara pertanian tetaplah sektor utama untuk meningkatkan *employment* di desa. Pada konteks hubungan desa-kota, pertumbuhan sektor perdesaan tidak mempunyai dampak signifikan terhadap *employment* di kota, sementara pertumbuhan di kota mengurangi *employment* di desa. Jadi, kebijakan pemerintah yang menjamin pertanian perdesaan menikmati pertumbuhan dalam jangka panjang, pengendalian TFR rendah sehingga jumlah angkatan kerja terkendali juga, pembangunan sarana pendidikan sehingga tidak perlu melanjutkan ke kota dan modernisasi desa berimplikasi mengurangi urbanisasi yang pada akhirnya mengurangi pengangguran di kota.

Fenomena setengah pengangguran di kota mencerminkan pendapatan dan produktivitas yang rendah. Penyebab produktivitas rendah, antara lain kurangnya ketrampilan, biasanya orang kurang trampil dalam pekerjaan karena pendidikannya rendah. Pendidikan yang diperoleh di sekolah kadang-kadang terlalu umum sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaan.

Akibatnya orang berpendidikan agak tinggi masih memiliki produktivitas rendah, maka kebijakan berupa pemberian pelatihan kerja dan kewirausahaan, bantuan pinjaman atau kemudahan akses mendapat pinjaman dapat meningkatkan pemberdayaan diri (*self empowerment*). Ditambah dengan mengendalikan TFR rendah yang sejalan dengan perspektif angkatan kerja, hal ini mengimplikasikan pengangguran dapat dikurangi. Jadi, penyediaan berbagai jenis pekerjaan, tetapi menawarkan upah di bawah upah pasar (UMR) atau fokus pada sektor yang keliru akan menjadi tidak efektif mengurangi pengangguran.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah masalah pengangguran ini bukanlah merupakan masalah yang sepele, perlu mengetahui definisi, akar penyebab, bentuk-bentuk, dan dampak dari pengangguran itu sendiri agar dapat menemukan satu titik upaya dalam mengatasinya.

Seperti yang diketahui, pengangguran merupakan suatu persoalan yang bersifat multidimensional, pengangguran memiliki implikasi yang beragam. Implikasi tersebut dapat bersifat menyeluruh jika tidak segera diatasi. Namun beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi pengangguran, seperti mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur melalui pembangunan jalan dan lain sebagainya untuk memperluas tenaga kerja.

Masalah pengangguran juga merupakan masalah yang sangat berhubungan dalam siklus ekonomi dan merupakan mata rantai dari kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu bersama-sama untuk mengupayakan penurunan tingkat pengangguran agar tidak berdampak pada kelesuan ekonomi dan menyejajarkan masyarakat untuk dapat hidup berkecukupan dan sejahtera.

REFERENSI

- Bicerli Mustafa Kemal and Gundogan Naci. 2009. *Female Labor Force Participation in Urbanization Process: The Case of Turkey*. MPRA Paper No. 18249, Posted 2, November.
- Borjas, George J. 1999. *Labor Economics*. Second Edition. Irwin McGraw-Hill.
- BPS. 2008. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007*. Jakarta.
- Ehrenberg, Ronald G and Robert S. Smith. 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. International Edition. Boston: Addison Wesley.
- Frisbie, W. Paker. 2005. *Infant Mortality*. Dalam handbook of Population, edited Dudley L. Poston and Michael Micklin. Springeronline.com. Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Hauser, Philip. 1974. The Measurement of Labour Utilization, *Malayan Economic Review*, 1 (April): 1 – 25.
- Jones, Gavin W, 2010. Changing Marriage Patterns in Asia. *Asia Research Institute Working Paper Series No. 131*. arigwj@nus.edu.sg Asia Research Institute National University of Singapore.
- Lewis, Blane D. 2010. *The Impact of Demographic Change and Urbanization on Economic Growth in Indonesia*. Lee Kuan Yew School of Public Policy. Working Paper No. SPP 10-07.
- Lucas, Robert E.B. 1997. Internal Migration in Developing Countries. Dalam *Handbook of Population and Family Economics*, edited by M.R. Rosenzweig and O. Stark. Elsevier Science B.V.
- Manning, Alan. 2007. “The Plant Size-Place Effect: Agglomeration and Monopsony in Labour Markets”. *CEP Discussion Paper No. 773*.
- Moleong, J.Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, S.Philip dan Kellie J. Hagewen. 2005. Fertility. Dalam *Handbook of Population*, edited by Dudley L Poston and Michael Micklin. Springeronline.com. Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Muhammad Irfan Ghani, Muhammad Shahid, and Mahboob Ul Hasan. 2011. *Some Socio-Economic Determinants of Fertility in Pakistan: An Empirical Analysis*. <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/38742/>
- Neell, Colin, 1988. *Methods and Models in Demography*. New York: The Guilford Press.
- Nurlina Tarmizi. 2012. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Edisi kedua. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Nurlina Tarmizi. 2013. *Tri Matra Kependudukan*. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Patnaude, Art and William Horobin. 2013. Europe’s Unemployment Problem Worsen. *Europe News* . Google Kamis, 30 Mei 2013.
- Rai, P., Paudel, I.S., Ghimire, A., Pokharel, P.K., Rijal, R., Niraula, S.R. (2014). Effect of gender preference on fertility: cross-sectional study among women of Tharu community from rural area of eastern region of Nepal. *Reproductive Health*, 11: 15. <http://www.reproductive-health-journal.com/content/11/1/15>
- Raley, R. Kelly. 2001. Increasing Fertility in Cohabiting Unions: Evidence for the Second Demographic Transition in The United States. *Demography*, 38 (1): 59-66. <http://www.jstor.org>.

- Rogers, Richard G, Robert A Hummer, dan Patrick M. Krueger. 2005. Adult Mortality. Dalam *Handbook of Population*, edited by Dudley L Poston and Michael Micklin. Springeronline.com. Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 1994. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Sri Poedjastoeti. 1985. *Metodologi Pengukuran Mortalitas: Tinjauan Non-Teknis Terhadap Beberapa Penelitian di Indonesia*. Proyek Penelitian Morbiditas dan Mortalitas Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*. Jakarta. Intermedia.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- White, Michael J, et.al. 2002. *Urbanization and The Fertility Transition in Ghana*. Mellon Foundation. Diakses tanggal 17 Mei 2013.
- White, Michael J, et.al. 2006. *Urbanization and Fertility: An Event History Analysis for Coastal Ghana*. Institute for Demographic Research. Diakses tanggal 20 Mei 2013.

LAMPIRAN 1

Kota/Propinsi Asal	Alasan melakukan Perpindahan (%)					Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Palembang						
• Jawa Barat	10,3	2,4	2,1	6,9	1,0	22,8
• Jawa Tengah	5,2	0,7	0,3	0,2	0,3	12,8
• Dalam Prop. SUMSEL	18,6	4,1	1,0	4,5	0,3	28,6
• Lainnya	15,5	3,4	1,7	3,1	0	23,8
• Tidak Pindah	0	0	0	0	12,1	12,1
Jumlah	49,6	10,7	5,2	20,7	13,8	100,0
(n)	144	31	15	60	40	290
Prabumulih						
• Jawa Barat	2,9	0	2,9	0	0	5,7
• Jawa Tengah	8,6	5,7	2,9	0	0	17,1
• Dalam Prop. SUMSEL	2,9	2,9	0	0	0	5,7
• Lainnya	54,3	11,4	2,9	0	0	68,6
• Tidak Pindah	0	0	0	0	2,9	2,9
Jumlah	68,6	20,0	8,6	0	2,9	100,0
(n)	24	7	3	0	1	35
Pagaralam						
• Jawa Barat	6,3	0	3,1	0	0	9,4
• Jawa Tengah	12,5	0	0	0	0	12,5
• Dalam Prop. SUMSEL	31,3	21,9	3,1	0	0	56,3
• Lainnya	18,8	3,1	0	0	0	21,9
Jumlah	68,8	25,0	6,3	0	0	100,0
(n)	22	8	2	0	0	32
Lubuk Linggau						
• Jawa Barat	4,7	4,7	0	0	0	9,3
• Jawa Tengah	14,0	2,3	0	0	0	16,3
• Dalam Prop. SUMSEL	16,3	18,6	0	0	0	34,9
• Lainnya	34,9	2,3	2,3	0	0	39,5
Jumlah	69,8	27,9	2,3	0	0	100,0
(n)	30	12	1	0	0	43
Kota di SUMSEL						
• Jawa Barat	8,8	2,3	2,0	5,0	0,8	18,8
• Jawa Tengah	7,0	1,3	0,5	4,5	0,3	13,5
• Dalam Prop. SUMSEL	18,0	7,0	1,0	3,3	0,3	29,5
• Lainnya	21,3	4,0	1,8	2,3	0	29,3
• Tidak Pindah	0	0	0	0	9,0	9,0
Jumlah	55,0	14,5	5,3	15,0	10,3	100,0
(n)	220	56	21	60	41	400

LAMPIRAN 2

Kota	Mengikuti Saran Pemerintah			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak Punya Pendapat	
Palembang				
• Buruh	11,7	13,8	11,7	37,2
• Tukang Ojek	5,5	5,2	1,7	12,4
• Penjual Makanan	10,7	11,7	10,0	32,4
• Lainnya	5,9	5,5	6,6	17,9
Jumlah	33,8	36,2	30,0	100,0
(n)	98	105	87	290
Prabumulih				
• Buruh	34,3	37,1	17,1	88,6
• Tukang Ojek	2,9	0	0	2,9
• Penjual Makanan	0	2,9	2,9	5,7
• Lainnya	0	0	2,9	2,9
Jumlah	37,1	40,0	22,9	100,0
(n)	13	14	8	35
Pagaralam				
• Buruh	34,4	12,5	12,5	59,4
• Tukang Ojek	0	3,1	0	3,1
• Penjual Makanan	6,3	3,1	3,1	12,5
• Lainnya	9,4	9,4	6,3	25,0
Jumlah	50,0	28,1	21,9	100,0
(n)	16	9	7	32
Lubuk Linggau				
• Buruh	4,7	7,0	2,3	14,0
• Tukang Ojek	2,3	7,0	2,3	11,6
• Penjual Makanan	14,0	7,0	9,3	30,2
• Lainnya	18,6	16,3	9,3	44,2
Jumlah	39,5	37,2	23,3	100,0
(n)	17	16	10	43
4 Kota				
• Buruh	14,8	15,0	11,3	41,0
• Tukang Ojek	4,5	4,8	1,5	10,8
• Penjual Makanan	9,8	9,8	8,8	28,3
• Lainnya	7,0	6,5	6,5	20,0
Jumlah	36,0	36,0	28,0	100,0
(n)	144	144	112	400

LAMPIRAN 3

Kota/Anak Ideal	Merasa cukup dengan anak yang dimiliki (%)			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak berpendapat	
Palembang				
• 1-2 anak	24,7	54,0	82,8	36,9
• 3 anak lebih	2,5	34,9	0	9,3
• Tidak Menjawab	72,7	11,1	17,2	53,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(n)	198	63	29	290
Prabumulih				
• 1-2 anak	26,3	27,3	20,0	25,7
• 3 anak lebih	5,3	63,6	0	22,9
• Tidak Menjawab	68,4	9,1	80,0	51,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(n)	19	11	5	35
Pagaralam				
• 1-2 anak	73,3	0	0	
• 3 anak lebih	23,3	100,0	0	68,8
• Tidak Menjawab	3,3	0	0	28,1
Jumlah	100,0	100,0	0	3,1
(n)	30	2	0	32
Lubuk Linggau				
• 1-2 anak	0	77,8	0	16,3
• 3 anak lebih	0	22,2	0	4,7
• Tidak Menjawab	100,0	0	100,0	79,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(n)	30	9	4	43
4 kota di SUMSEL				
• 1-2 anak	27,4	51,8	65,8	36,3
• 3 anak lebih	4,7	38,8	0	11,5
• Tidak Menjawab	67,9	9,4	34,2	52,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(n)	277	85	38	400